

**PERUBAHAN
RENCANA
KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan demikian Perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dan RPD serta Renstra 2024-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan bulan Juni 2025 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	20
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Capaian Kinerja Diskominfo Kota Pontianak	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) Tahun Anggaran 2025.....	9
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025.....	24

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENYELARASAN SUB KEGIATAN	43
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan Penjabaran dari Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pontianak.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan.
- b). adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan.
- c). adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar sub kegiatan, kegiatan dan program maupun antar jenis belanja.
- d). adanya perubahan indikator kerja pada sub kegiatan.
- e). adanya penyesuaian sasaran kegiatan mendahului perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu memuat usulan Program, Kegiatan dan beserta Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Pontianak Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);
21. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a). Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk

mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

b). Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Pontianak dengan Wali Kota Pontianak yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) Tahun 2025.
- Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025.

Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja yang dibuat untuk rentang waktu selama satu tahun ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 128 yaitu hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat daerah sistematika paling sedikit memuat terdiri dari pendahuluan, evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup, sistematika renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II**

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Sasaran yang ingin dicapai dan Program Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi.

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, yang nantinya hasil evaluasi digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil Keputusan untuk Perencanaan Kedepan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada Bab ini berisikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, mengacu pada APBD Tahun Berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Adapun Program-Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 3). Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 4). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 5). Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berdasarkan Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II, Program Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Diskominfo Kota Pontianak

No	Program	Indikator	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	93,59 %	Proses Penilaian Survey Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan dilakukan pertriwulan dan dimana hasil dari survey akan dibagi rata-rata pertriwulan
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	97,01 %	92,31 %	Hasil dari capaian kinerja berupa Jumlah Aplikasi yang berfungsi secara baik dibandingkan dengan Jumlah aplikasi yang tersedia
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	28,13 %	12,00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian/Jumlah Perangkat Daerah X 100%
4.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00 %	32,60%	Jumlah Layanan Informasi yang dilakukan dibagi Jumlah Layanan Informasi yang harus dilakukan sesuai ketentuan X 100% Jumlah Pengaduan yang masuk atau diterima dibagi Jumlah Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti X 100%
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	61,54 %	44,45 %	Jumlah Data Prioritas yang terpenuhi dibagi Jumlah Data Prioritas daerah yang harus dipenuhi X 100%

Berikut disajikan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai Triwulan II (Bulan Juni 2025) secara rinci dituangkan dalam Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)/ (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		
						Triwulan I			Triwulan II											
1	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100		12=6+10		16=12/5x100	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Rp 21.629.274.250	99,07 persen	Rp 7.159.669.075	95,00 persen	Rp 8.844.288.704	92,31 persen	Rp 1.732.050.188	- persen	Rp 774.778.046	23,08 persen	Rp 2.506.828.234	24,29	28,34	122,15 persen	Rp 9.666.497.309	128,58	Rp 44,69
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	81.952.400	100 persen	37.322.000	100 persen	40.033.300	13,33 persen	-	- persen	24.050.000	13,33 persen	24.050.000	13,33	60,07	113,33 persen	61.372.000	113,33	74,89
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	29.780.400	6 Dokumen	11.355.000	7 Dokumen	27.639.800	2 Dokumen		2 Dokumen	24.050.000	4 Dokumen	24.050.000	57,14	87,01	10 Dokumen	35.405.000	55,56	118,89
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	12.750.000	1 Dokumen	6.365.000	1 Dokumen	3.106.200	Dokumen		Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0,00	1 Dokumen	6.365.000	33,33	49,92
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	12.750.000	1 Dokumen	6.855.000	1 Dokumen	3.106.200	- Dokumen		Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0,00	1 Dokumen	6.855.000	33,33	53,76
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.539.200	4 Laporan	7.057.500	4 Laporan	4.100.700	Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	25,00	0,00	5 Laporan	7.057.500	41,67	52,13
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	13.132.800	2 Laporan	5.689.500	2 Laporan	2.080.400	- Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	50,00	0,00	3 Laporan	5.689.500	50,00	43,32

							r a n															
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 persen	15.858.900.000	97,58 Persen	5.080.081.759	100 Per sen	7.135.274.400	56,85 Persen	1.545.817.032	12,50Persen	595.427.789	69,35 Persen	2.141.244.821	69,35	30,01	66,93	Persen	7.221.326.580	166,93	45,53	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang / Bulan	15.204.593.000	28 Orang / Bulan	4.904.973.759	31 Ora ng / Bul an	6.977.915.000	24 Orang / Bulan	1.515.457.032	26 Orang / Bulan	573.630.389	50 Orang / Bulan	2.089.087.421	161,29	29,94	78	Orang / Bulan	6.994.061.180	252	46,00	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	638.760.000	12 Dokumen	167.653.000	12 Do ku me n	152.520.000	3 Dokum e	30.360.000	3 Doku men	20.240.000	6 Dokumen	50.600.000	50,00	33,18	18	Dokumen	218.253.000	50,00	34,17	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3.267.000	1 Laporan	2.345.000	1 Lapor a	1.643.800	1 Lapor a		Laoran	1.557.400	1 Laporan	1.557.400	100,00	94,74	2	Laporan	3.902.400	66,67	119,45	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	36 Laporan	12.280.000	12 Laporan	5.110.000	12 Lapor n	3.195.600	3 Laporan		3 Laporan		6 Laporan	-	50,00	0,00	18	Laporan	5.110.000	50,00	41,61	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	257.100.000	100 Persen	77.559.016	100 Perse n	94.682.900	0,00 Persen	-	66,67Persen		66,67 Persen	-	66,67	0,00	166,67	Persen	77.559.016	166,67	30,17	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	203.100.000	1 Paket	62.280.000	1 Pak et	75.249.900	- Paket		1 Paket		1 Paket	-	100,00	0,00	2	Paket	62.280.000	66,67	30,66	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	54.000.000	3 orang	15.279.016	3 ora ng	19.433.000	- orang		1 orang		1 orang	-	33,33	0,00	4	orang	15.279.016	50,00	28,29	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	863.930.629	98,21 persen	359.989.499	100 p e r s e n	329.067.173	15,48 pers en	27.940.550	52,82persen	64.120.824	68,30 persen	92.061.374	68,30	27,98	166,51	persen	452.050.873	166,51	52,32	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.864.764	1 Paket	8.814.500	1 pak et	9.300.095	paket	-	1 Paket	2.043.000	1 Paket	2.043.000	100,00	21,97	2	Paket	857.500	66,67	40,42	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	5 Paket	74.922.000	7 pak et	61.236.206	paket	0	5 Paket	13.145.000	5 Paket	13.145.000	71,43	21,47	10	Paket	112.780.000	-	0,00	

1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	435.000.000	7 Paket	99.635.000	3 paket	83.741.952	1 paket	5.280.000	1 Paket	18.120.000	2 Paket	23.400.000	66,67	27,94	9	Paket		112,50	25,93
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	82.625.865	1 Paket	27.012.000	1 paket	27.877.800	1 paket	3.152.000	1 Paket	6.460.000	1 Paket	9.612.000	100,00	34,48	2	Paket	36.624.000	66,67	44,33
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	26.640.000	12 Dokumen	6.820.000	12 Dokumen	8.880.000	3 Dokumen	1.120.000	3 Dokumen	1.120.000	6 Dokumen	2.240.000	50,00	25,23	18	Dokumen	9.060.000	50,00	34,01
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	240.000.000	2 Laporan	124.835.999	2 Laporan	88.131.120	1 Laporan	18.388.550	1 Laporan	23.232.824	1 Laporan	41.621.374	50,00	47,23	3	Laporan	166.457.373	50,00	69,36
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	52.800.000	5 Dokumen	17.950.000	5 Dokumen	49.900.000	1 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	40,00	0,00	7	Dokumen	17.950.000	46,67	34,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.204.486.048	100 Persen	546.754.400	100 Persen	210.173.115	50,00 Persen	21.500.000	5,88 Persen	-	55,88 Persen	21.500.000	55,88	10,23	155,88	Persen	568.254.400	155,88	47,18
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 paket	127.000.000	16 unit	18.760.000	5 unit	24.530.700	5 unit	21.500.000	- unit	-	5 unit	21.500.000	100,00	87,65	21	unit	40.260.000	80,77	31,70
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Unit	1.077.486.048	20 Unit	527.994.400	17 unit	185.642.415	1 unit		2 Unit	-	2 Unit	-	11,76	0,00	22	Unit	527.994.400	25,29	49,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	3.042.202.427	100 Persen	949.610.901	100 Persen	941.195.185	0,00 Persen	122.672.106	25,00 Persen	81.620.833	25,00 Persen	204.292.939	25,00	21,71	125	Persen	1.153.903.840	125,00	37,93
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	17.000.000	1 Laporan	5.220.000	1 Laporan	6.070.000	1 Laporan	Rp3.000.000	1 Laporan	2.800.000	1 Laporan	5.800.000	100,00	95,55	2	Laporan	11.020.000	66,67	64,82
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.300.000.000	1 Laporan	698.646.733	1 Laporan	738.600.000	1 Laporan	Rp83.876.410	1 Laporan	53.165.137	- Laporan	137.041.547	-	18,55	1	Laporan	835.688.280	33,33	36,33
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	725.202.427	1 Laporan	245.744.168	1 Laporan	196.525.185	1 Laporan	Rp35.795.696	1 Laporan	25.655.696	- Laporan	61.451.392	-	31,27	1	Laporan	307.195.560	33,33	42,36
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	320.702.746	100 Persen	108.351.500	100 Persen	93.862.631	25,00 Persen	14.120.500	5,43 Persen	9.558.600	30,43 Persen	23.679.100	0,4348	25,23	130,43	Persen	132.030.600	130,43	41,17

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	110.702.746	2 unit	37.851.500	2 unit	42.590.000	unit	7.540.500,00	unit	6.108.600	- unit	13.649.100	-	32,05	2 unit	51.500.600	100,00	46,52		
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	180.000.000	92 unit	60.560.000	92 unit	41.272.631	15 unit	6.580.000,00	15 unit	3.450.000	30 unit	10.030.000	32,61	24,30	122 unit	70.590.000	132,61	39,22		
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	1 unit	9.940.000	1 unit	10.000.000	- unit	unit	-	- unit	-	-	0,00	1 unit	9.940.000	100,00	33,13			
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	98,51 Persen	8.817.790.000	97,50 Persen	3.582.876.179	97,01 Persen	2.775.100.750	91,36 Persen	984.505.056	95,03 Persen	740.098.148	92,31 Persen	1.724.603.204	95,16	62,15	189,81 Persen	5.307.479.383	192,68	60,19		
2.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 Perangkat Daerah	1.973.000.000	32 Perangkat Daerah	881.092.251	32 Perangkat Daerah	118.336.971	32 Perangkat Daerah	1.800.000	Perangkat Daerah	104.347.500	32,00 Perangkat Daerah	106.147.500	90,00	89,70	64 Perangkat Daerah	987.239.751	200,00	50,04		
2.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	118.048.251			-	Dokumen		-	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1 Dokumen	118.048.251	33,33	35,77		
2.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	1.643.000.000	1 Unit	763.044.000			-	Unit		-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1 Unit	763.044.000	33,33	46,44		
2.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0	-			1 Dokumen	118.336.971	- Dokumen	Rp1.800.000	Dokumen	104.347.500	-	Dokumen	106.147.500	-	89,70	-	Dokumen	106.147.500	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	8 Aplikasi Layanan Publik	6.844.790.000	30 Perangkat Daerah	2.701.783.928	32 Perangkat Daerah	2.656.763.779	32 Perangkat Daerah	982.705.056	Perangkat Daerah	635.750.648	32,00 Perangkat Daerah	1.618.455.704	100,00	60,92	62,00	Perangkat Daerah	4.320.239.632	775,00	63,12	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	5.470.000.000	1 Unit	2.385.713.288																
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 Unit	630.000.000	3 Unit	56.385.840																

	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Layan an	310.000.000	5 Layana n	64.519.800																
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Doku men	180.000.000	1 Dokum en	49.250.000																
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Doku men	144.000.000	1 Dokum en	51.485.000																
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Doku men	110.790.000	1 Dokum en	94.430.000																
2.2.1	Facilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				-	1 L a p o r a n	152.415.000	Lap oran	0	Lap oran	-	-	Laporan	-	-	0,00	-	Unit	-	#DIV /0!	#DIV/0 !
2.2.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				-	1 Do ku me n	1.604.694.496	Dokumen	257.725.056	Dokume n	632.190.648	-	Dokumen	889.915.704	-	55,46	-	Unit	889.915.704	#DIV /0!	#DIV/0 !
2.2.3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				-	3 Aplik asi	31.428.000	Aplikasi	4.500.000	1 Aplikasi	1.800.000	3	Aplikasi	6.300.000	100,00	20,05	3	Layanan	6.300.000	#DIV /0!	#DIV/0 !
2.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				-	5 Apl ika si	17.690.000	Aplikasi	Rp0	Aplikasi	-	-	Aplikasi		-	#VALU E!	-	Dokumen	#VALUE!	#DIV /0!	#VALU E!
2.2.5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				-	32 unit	115.050.000	unit	0	unit	-	-	unit	-	-	0,00	-	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0 !
2.2.6	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				-	32 PD	735.486.283	PD	720.480.000	2 PD	1.760.000	26	PD	722.240.0	81,25	98,20	26	Dokumen	722.240.000	#DIV/0!	#DIV/0 !

3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	34,38 Persen	282.950.000	21,88 Persen	125.999.614	28,13 Persen	135.018.000	Persen	-	12,50 Persen	-	12,50 Persen	-	ALUE !	0,00	34,38 Persen	125.999.614	100,00	44,53
3.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Kemanan Informasi (SMKI)	44,78 Persen	245.450.000	33,58 Persen	117.099.614	35,82 Persen	128.618.000	Persen	-	9,38 Persen	-	9,38 Persen	-	26,17	0,00	42,96 Persen	117.099.614	95,92	47,71
3.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	23.500.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	8.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0,00	1 Dokumen	7.000.000	33,33	29,79
3.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3 Laporan	44.000.000	1 Laporan	8.755.000	1 Laporan	15.000.000	Laporan	-	Laporan	-	- Laporan	-	-	0,00	1 Laporan	8.755.000	33,33	19,90
3.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	165.000.000	1 Laporan	98.894.614	1 Laporan	100.618.000	Laporan	-	Laporan	-	- Laporan	-	-	0,00	1 Laporan	98.894.614	33,33	59,94
3.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 PD	12.950.000	5 PD	2.450.000	5 PD	5.000.000	5 PD	-	PD	-	5 PD	-	100,00	0,00	10 PD	2.450.000	66,67	18,92
3.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	79,13 Persen	37.500.000	50,00 Persen	8.900.000	63,51 Persen	6.400.000	Persen	-	Persen	-	- Persen	-	-	0,00	50,00 Persen	8.900.000	63,19	23,73
3.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 PD	37.500.000	5 PD	8.900.000	5 PD	6.400.000	PD	-	PD	-	- PD	-	-	0,00	5 PD	8.900.000	33,33	23,73
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	90 Persen	2.360.055.506	98,98 Persen	607.494.107	80,00 Persen	668.898.400	24,30 Persen	51.389.888	16,67 Persen	74.289.888	40,97 Persen	125.679.776	51,21	18,79	139,95 Persen	733.173.883	155,50	31,07
4.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana/media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan/ dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	15 Informasi	2.360.055.506	13 Media	607.494.107	15 Media	668.898.400	8 Media	51.389.888	1 Media	74.289.888	9 Media	125.679.776	60,00	18,79	22 Media	733.173.883	146,67	31,07
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	12 Dokumen	159.999.920	4 Dokumen	41.375.000														

5.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	1.524.351.244	100 persen	369.900.700,00	100 persen	387.756.463	25,00 persen	53.442.030	25,00 persen	91.654.000	50,00 persen	145.096.030	50,00	37,42	150,00	persen	514.996.730	150,00	33,78
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	176.332.639	3 Dokumen	51.285.000,00															
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 orang	110.149.845	32 Orang	31.706.000,00															
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	6 Dokumen	174.505.120	2 Dokumen	46.470.500,00															
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 PD	350.102.540	32 Orang	56.610.800,00															
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 Dokumen	713.261.100	3 Dokumen	183.828.400,00															
5.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				-	37 Orang	96.149.906	2 Orang	Rp22.782.030	32 Orang	13.400.000	34 Orang	36.182.030	91,89	37,63	34	Dokumen	36.182.030	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				-	100 %	38.929.638	25,00 %	Rp3.600.000	25 %	11.705.500	50 %	15.305.500	50,00	39,32	50	Orang	15.305.500	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				-	100 %	252.676.919	25,00 %	Rp27.060.000	25 %	66.548.500	50 %	93.608.500	50,00	37,05	50	Dokumen	93.608.500	#DIV/0!	#DIV/0!
				11.845.939.675				12.811.062.317		2.821.387.162		1.680.820.082		4.502.207.244					6.348.146.919		

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 yang belum mendapai target kinerja dengan Pemetaan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
 - Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan RKA Tahun 2025 dimulai pada Triwulan III.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025 dimulai pada Triwulan III.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dilaksanakan selama 12 bulan dan kinerja masih 0 dari target sebanyak 1 laporan, hal ini disebabkan berupa laporan yang akan dilakukan pada triwulan IV
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dilaksanakan selama 12 bulan dan kinerja masih 0 dari target sebanyak 1 laporan, hal ini disebabkan berupa laporan yang akan dilakukan pada triwulan IV
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pembayaran pajak kendaraan yakni mobil dan motor yang dilakukan pada triwulan III, dengan target kinerja 2 unit dan terealisasi 0.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Unit (0 %) dikarenakan di perubahan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Unit (0 %) dikarenakan di perubahan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan di ubah menjadi Renovasi (Perbaikan Aset Tetap yang Rusak atau Mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas) dari Akun Belanja Pemeliharaan ke Belanja Modal.

- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain melakukan penyusunan dokumen juga telah dilakukan penambahan sub domain sebanyak 1 sub domain dan dilakukan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan sub domain yang ada.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja lain yang dihasilkan adalah penyediaan internet di data senter, mengelola server dan Perangkat Daerah IT, melakukan Monitoring dan pemeliharaan server, penambahan server gaji dari unit BKD dan penambahan instalasi 2 unit UPS sebesar 15 dan 20 Va.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini Rapat Koordinasi, Mengelola SPLP pusat untuk di integrasikan (antara aplikasi teman disko dengan BSSN) dan Pengembangan SPLP Daerah.
 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini Pengembangan dan pengelolaan aplikasi jepin sebagai portal Smart City dan Pelaksanaan literasi digital berkolaborasi dengan BPSDM Komdigi terkait Cyber Security di lingkungan SMP di Kota Pontianak.
- 3) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan pembuatan

Dokumen hasil kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan draft Keputusan Wali Kota tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan pembuatan Laporan hasil kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, target kinerja mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan pembuatan Laporan hasil kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Selain penyusunan laporan kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini dilakukan identifikasi kerentanan, monitoring keamanan jaringan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja mencapai 0 dari Target 5 Perangkat Daerah (0 %) dikarenakan belum dilakukan sosialisasi keamanan informasi dan tandatangan elektronik yang akan dilaksanakan sebanyak 5 Perangkat Daerah yang telah ditargetkan.
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sampai dengan triwulan II masih 0, hal ini disebabkan masih dilakukan proses perjanjian kerjasama sama dengan pihak Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target Kinerja, Pagu Indikatif, yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika menurun dari APBD Kota Pontianak Tahun 2025 yang semula sebesar Rp.13.094.574.484,- pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menjadi Rp.12.811.062.317,- ada penurunan sebesar Rp.283.512.167,- Hal ini disebabkan karena adanya refocusing yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Kategori belanja yang harus dilakukan refocusing antara lain pada belanja makan dan minum, Bahan Kegiatan Kantor, Pemeliharaan Alat Kantor dan Perjalanan Dinas.

Adapun uraian Sub Kegiatan yang mengalami penurunan atau kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Relasi Media

Anggaran murni pada sub kegiatan Relasi Media sebesar Rp.33.744.600,- dan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp.20.390.000,-. Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada Alata tulis kantor, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman lapangan serta perjalanan dinas dalam kota.

2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Anggaran murni pada sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat sebesar Rp.118.886.400,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.92.893.400,-. Pengurangan anggaran pada sub kegiatan ini pada belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas.

3. Pelayanan Informasi Publik

Anggaran murni pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp.116.447.910,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.95.582.420,-. Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja makanan dan minuman lapangan serta belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.

4. Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik
Anggaran murni pada sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik sebesar Rp.43.730.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.43.120.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada makanan dan minuman rapat.
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Anggaran murni pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp.173.110.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.170.532.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman lapangan.
6. Penyusunan Konten
Anggaran murni pada sub kegiatan Penyusunan Konten sebesar Rp.260.299.912,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.215.382.132,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja bahan komputer serta makanan dan minuman rapat.
7. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
Anggaran murni pada sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa sebesar Rp.124.070.971,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.118.336.971,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja makanan dan minuman rapat.
8. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
Anggaran murni pada sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah sebesar Rp.1.567.779.496,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.1.604.694.496,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada Belanja Modal Personal Computer (Handphone iPhone sebanyak 1 unit dan SSD server sebanyak 3 unit) serta Belanja Modal Peralatan Jaringan
9. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
Anggaran murni pada sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah sebesar Rp.59.328.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.31.428.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja makanan dan minuman lapangan.
10. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Anggaran murni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebesar Rp.32.940.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.17.690.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini makanan dan minuman rapat.
11. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
Anggaran murni pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas sebesar Rp.127.810.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.115.050.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja perjalanan dinas dalam kota.

12. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Anggaran murni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp.738.486.283,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.735.486.283,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja perjalanan dinas dalam kota.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran murni pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.38.039.800,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.27.639.000,- Pengurangan pada sub kegiatan ini pada Sovenir Acara Forum SKPD yang akan diperuntukkan dalam acara Forum Perangkat Daerah
14. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran murni pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp.201.720.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.152.520.000,- Pengurangan anggaran dilakukan pada belanja honorarium PPTK dan honorarium KPA yang menyesuaikan dengan kondisi.
15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Anggaran murni pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp.78.780.000,- terjadi pengurangan anggaran sehingga anggarannya menjadi Rp.75.249.900,-, hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai PJLP yang diangkat menjadi PPPK di instansi luar.
16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Anggaran murni pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.36.000.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.84.190.000,- penambahan anggaran ini dilakukan adanya penambahan Bimtek yang harus diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah terlaksana seperti Pelatihan Visualisasi Data Menggunakan Metabase, Optimalisasi Manajemen API Menggunakan WSO2 dan Pemanfaatan AI untuk Chatbot Sistem Layanan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik.
17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran murni sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.72.097.600,- dan terjadi pengurangan anggaran perubahan menjadi Rp.61.236.206,- Pengurangan anggaran dilakukan pada belanja barang habis pakai.
18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran murni sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 50.702.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.84.147.195,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.33.445.195,-. Penambahan anggaran dilakukan pada sub belanja makanan dan minuman rapat.

19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran murni sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.91.000.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.94.171.120,- atau terjadi penambahan anggaran yang diperuntukkan untuk tambahan perjalanan dinas luar daerah.
20. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Anggaran murni sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp.17.600.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.54.700.000,- atau terjadi penambahan anggaran yang diperuntukkan untuk honorarium operator sistem.
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran murni sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.219.735.185,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.166.956.185,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja Jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga informasi dan teknologi dan belanja lembur serta belanja sewa lapangan.
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran murni sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.64.377.500,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.42.228.500,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/laptop dan pemeliharaan printer.
23. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Anggaran murni sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral sebesar Rp.151.720.876,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.96.149.906,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat.
24. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
Anggaran murni sub kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional sebesar Rp.57.992.638,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.38.929.638,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor serta makanan dan minuman rapat.
25. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Anggaran murni sub kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional sebesar Rp.274.798.919,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.252.676.919,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor.
26. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran murni sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.500.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.6.400.000,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam kota.

Tabel. 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								12.826.779.000,00	13.094.074.484,00	12.811.062.317,00	-15.716.683,00						10.340.726.714,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.826.779.000,00	13.094.074.484,00	12.811.062.317,00	-15.716.683,00							10.340.726.714,00	
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.192.748.567,00	12.468.444.051,00	12.304.315.854,00	111.567.287,00							9.927.895.214,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Keseekretariatan				95 %	95 %	8.624.081.315,00	8.919.365.479,00	8.890.317.816,00	-152.847.101,00							8.471.234.214,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	42.512.800,00	50.433.300,00	40.033.300,00	-2.479.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		14.164.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	24.926.800,00	38.039.800,00	27.639.800,00	2.713.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.772.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	3.106.200,00	3.106.200,00	-1.143.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.106.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	3.106.200,00	3.106.200,00	-1.143.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.106.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.644.600,00	4.100.700,00	4.100.700,00	-543.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.441.400,00	2.080.400,00	2.080.400,00	-2.361.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintaha n yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintaha n yang Baik			2.080.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	6.929.678.000,00	7.184.473.884,00	7.135.274.400,00	205.596.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	null		7.228.410.114,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.710.619.000,00	6.977.914.484,00	6.977.915.000,00	267.296.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			7.021.873.514,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	213.720.000,00	201.720.000,00	152.520.000,00	-61.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			201.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.089.000,00	1.643.800,00	1.643.800,00	554.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.621.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.250.000,00	3.195.600,00	3.195.600,00	-1.054.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.195.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	100 %	85.700.000,00	115.455.000,00	159.439.900,00	73.739.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		112.855.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	67.700.000,00	78.780.000,00	75.249.900,00	7.549.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			76.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	18.000.000,00	36.675.000,00	84.190.000,00	66.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			36.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	308.317.155,00	277.457.495,00	340.312.416,00	31.995.261,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		298.589.615,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.300.095,00	9.300.095,00	300.095,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.300.095,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	78.260.200,00	72.097.600,00	61.236.206,00	-17.023.994,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			62.594.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	82.035.000,00	50.702.000,00	84.147.195,00	2.112.195,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			73.933.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.541.955,00	27.877.800,00	27.877.800,00	335.845,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			27.877.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00	91.000.000,00	94.171.120,00	9.171.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			69.004.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	14 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	54.700.000,00	37.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	163.320.360,00	210.173.115,00	208.813.115,00	45.492.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		74.995.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	24.530.700,00	24.530.700,00	-5.469.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.530.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	133.320.360,00	185.642.415,00	184.282.415,00	50.962.055,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.464.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	987.553.000,00	964.405.185,00	911.626.185,00	-75.926.815,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		600.155.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	70.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.070.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	735.000.000,00	738.600.000,00	738.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	246.553.000,00	219.735.185,00	166.956.185,00	-79.596.815,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			174.085.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	107.000.000,00	116.967.500,00	94.818.500,00	-12.181.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		142.064.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.000.000,00	42.590.000,00	42.590.000,00	5.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 Unit	92 Unit	60.000.000,00	64.377.500,00	42.228.500,00	-17.771.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			45.064.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik				80 %	80 %	748.613.612,00	746.248.822,00	637.899.952,00	-188.613.612,00							560.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat				15 Media	15 Media	748.613.612,00	746.248.822,00	637.899.952,00	-110.713.660,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyara kat		560.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0 014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				4 Laporan	4 Laporan	150.372.600,00	33.774.600,00	20.390.000,00	-129.982.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0 015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				6 Komunitas	6 Komunitas	130.691.000,00	118.886.400,00	92.893.400,00	-37.797.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															melalui peran aktif koperasi.					
	2.16.02.2.01.0 017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				24 Permohonan	24 Permohonan	102.946.384,00	116.447.910,00	95.582.420,00	-7.363.964,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			83.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0 019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	55.175.200,00	43.730.000,00	43.120.000,00	-12.055.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0 021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	57.992.638,00	173.110.000,00	170.532.000,00	112.539.362,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				240 Konten	240 Konten	251.435.790,00	260.299.912,00	215.382.132,00	-36.053.658,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE				97,01 Persen	97,01 Persen	2.820.053.640,00	2.802.829.750,00	2.776.098.086,00	-1.923.392.640,00							896.661.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	158.000.000,00	124.070.971,00	118.336.971,00	-39.663.029,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		156.978.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.01.004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	158.000.000,00	124.070.971,00	118.336.971,00	-39.663.029,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			156.978.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE				-	32 Perangkat Daerah	2.662.053.640,00	2.678.758.779,00	2.657.761.115,00	-4.292.525,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		739.683.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	103.430.000,00	152.415.000,00	152.415.000,00	48.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			152.415.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokume n	1 Dokume n	1.607.433.000,00	1.567.779.496,00	1.605.691.832,00	-1.741.168,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPA TAN TRANSFE R ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0 020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	118.285.840,00	59.328.000,00	31.428.000,00	-86.857.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			59.328.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0 021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				5 Aplikasi	5 Aplikasi	100.000.000,00	32.940.000,00	17.690.000,00	-82.310.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			32.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0 023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				32 unit	32 unit	65.000.000,00	127.810.000,00	115.050.000,00	50.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	667.904.800,00	738.486.283,00	735.486.283,00	67.581.483,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							492.912.433,00	484.512.433,00	371.728.463,00	-121.183.970,00							271.213.500,00	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data prioritas daerah				61,54 %	61,54 %	492.912.433,00	484.512.433,00	371.728.463,00	-221.698.933,00							271.213.500,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota				100 %	100 %	492.912.433,00	484.512.433,00	371.728.463,00	-121.183.970,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		271.213.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				37 Orang	37 Orang	151.720.876,00	151.720.876,00	94.636.906,00	-57.083.970,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			101.003.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	57.992.638,00	57.992.638,00	36.209.638,00	-21.783.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persenta se	100 Persenta se	283.198.919,00	274.798.919,00	240.881.919,00	-42.317.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			164.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							141.118.000,00	141.118.000,00	135.018.000,00	-6.100.000,00							141.618.000,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah				-	28,13 %	141.118.000,00	141.118.000,00	135.018.000,00	500.000,00							141.618.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Kemanan Informasi (SMKI)				-	35,82 %	128.618.000,00	128.618.000,00	128.618.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		129.118.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	100.618.000,00	100.618.000,00	100.618.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.618.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi				-	63,51 %	12.500.000,00	12.500.000,00	6.400.000,00	-6.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	null		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	6.400.000,00	-6.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								12.826.779.000,00	13.094.074.484,00	12.811.062.317,00	-15.716.683,00							10.340.726.714,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 untuk menjaga Konsistensi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran.

A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1). Sekretariat, Bidang-Bidang 2025 dan seluruh staf di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 serta menjaga Konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan.
- 2). Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

B. Rencana Tindak Lanjut

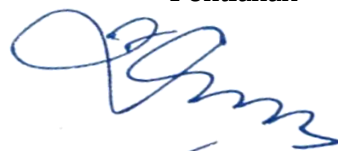
Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pontianak



Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198603 1 009

LAMPIRAN I
PENYELARASAN SUB KEGIATAN

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KEPMEN 1317	APLIKASI SIPD.RI
1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Penyusunan Konten
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
5	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	
6	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Sub Kegiatan Relasi Media
7	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
9	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali pemerintah Daerah
11	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
13	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KEPMEN 1317	APLIKASI SIPD.RI
	Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Sub Kegiatan fasilitas Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
16	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	
18	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
20	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional